

ADAPTASI MASYARAKAT URBAN TERHADAP PERUBAHAN SISTEM MATA PENCAHARIAN DAERAH OTONOMI BARU KOTA TANGERANG SELATAN - BANTEN

ADAPTATION OF URBAN COMMUNITIES DUE TO LIVELIHOOD CHANGING SYSTEM IN THE NEW AUTONOMOUS REGION, SOUTH TANGERANG CITY – BANTEN

Kholis Ridho

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan
E-mail: kholis.ridho@uinjkt.ac.id; kholisridho@gmail.com; kholisridho@ymail.com

Diterima: 19 Februari 2016; Direvisi: 13 Juni 2016; Disetujui: 23 Juni 2016

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji ketahanan sosial-ekonomi masyarakat miskin perkotaan terhadap perubahan daerah otonomi baru Kota Tangerang Selatan 2008. Yakni apa saja bentuk adaptasi sosial dan ekonomi yang berkembang dan bagaimana konsekuensi pilihan adaptasi dalam upaya merespon situasi sosial ekonomi paska pemekaran daerah otonomi baru tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah survei-kuantitatif terhadap warga di kampung miskin melalui penarikan sampel secara *multistage random sampling*. Hasil yang didapatkan adalah sekurangnya terdapat tiga klasifikasi (tipologi) masyarakat perkotaan dalam merespon perubahan daerah otonomi baru. Pertama adalah individu atau masyarakat yang cepat menyesuaikan dengan situasi baru, mampu mengatasi dan menyesuaikan halangan-tantangan yang ada di lingkungannya, meskipun tidak selalu berhasil memanfaatkan sumber-sumber perekonomian yang tersedia. Kedua, sulit melakukan penyesuaian dengan norma-norma baru, atau tidak mampu menyesuaikan dengan ketegangan-ketegangan elit-politis yang terjadi, meskipun juga tak mampu menolak/tidak berdaya dengan pelbagai perubahan yang terjadi. Ketiga, menolak perubahan dan tidak bersedia menyesuaikan dengan keadaan yang ada meski tetap “terpaksa” hidup bersama baik secara sosial dan ekonomi. Unikunya mereka yang dalam kategori ini adalah masyarakat dengan status sosial menengah ke-atas, atau tingkat pendapatan yang layak, atau di atas 4 juta ke atas. Kategori ketiga ini adalah model penyesuaian “terbaru” yang nampaknya khas pada masyarakat urban.

Kata kunci: adaptasi sosial, modal sosial, budaya urban, masyarakat miskin perkotaan.

Abstract

This study aimed to assess the socio-economic resilience of the urban poor as a result of changing in the new autonomous region of South Tangerang City, 2008. That is about the various forms of social adaptation and developing economies, and how wide the consequences of adaptation in an effort to respond to the social and economic situation after the establishment of the new autonomous region. Research method that used is quantitative survey of residents in poor villages (kampung) through sampling by multistage random sampling. The results obtained are at least there are three classifications (typology) of urban communities in an effort to respond to changes in the new autonomous region. The first is an individual or society that quickly adapt to the new situation, unable to cope and adjust hitch-challenges that exist in their environment, though not always successfully utilize the economic resources available. Second, it is difficult to adjust to the new norms, or are not able to adjust to the tensions that occur on political elites, although it also could not resist / helpless with various changes. Third, reject social and economic change and not willing to adapt to existing circumstances but still is “forced” to live together both socially and economically. Uniquely those in this category are people with medium social status above all, or a decent level of income, or over 4 million. This third category is the model adjustment of the “latest” which seems typical in urban society.

Keywords: social adaptation, urban culture, poor people, economic empowerment.

PENDAHULUAN

Sejak Tangerang Selatan resmi menjadi daerah otonomi baru tahun 2008, semakin menegaskan perubahan sistem perekonomian sebagai wilayah industri barang dan jasa yang sebelumnya bertani (Satono Kartodiardjo, 1984). Permasalahan tersebut secara nyata telah merubah sistem sosial dan budaya yang berkembang pada masyarakat Tangerang Selatan (selanjutnya disebut Tangsel). Uniknyariset ini secara mengejutkan menemukan bahwasanya bukan dari mereka yang secara adaptif menerima perubahan sistem sosial dan ekonomi yang sukses secara finansial, tetapi justru dari kalangan mereka yang “menolak” perubahan itu sendiri. Pasalnya, Tangsel kini tidak lagi dihuni oleh masyarakat Banten sebagaimana sebelum era 60-70an, komposisi penduduk Tangsel telah bertransformasi menjadi hunian urban baru penyanggah propinsi DKI Jakarta. Karena itu sistem sosial dan ekonomi yang tumbuh secara alamiah dan rekayasa telah “bercampur” membentuk situasi baru yang tidak selamanya mampu mendorong konsepsi kekerabatan dan gotong-royong sebagai basis pembangunan daerah yang partisipatif di wilayah urban. Bandingkan dengan DKI Jakarta misalnya, meskipun dinyatakan sebagai wilayah megapolitan, kebudayaan asli yang ditetapkan pemerintah DKI Jakarta adalah Budaya Betawi, sementara Tangerang Selatan masih belum secara resmi dan aklamasi menetapkan pilihan kebudayaan lokal tertentu sebagai kebudayaan bersama.

Perubahan masyarakat yang berasal dari faktor eksternal termasuk pembangunan terpusat hemat penulis, terbukti mampu mencerabut kearifan masyarakat lokal itu sendiri dan sistem mata pencaharian ekonomi di lingkungannya. Karena itu pendekatan dan strategi pembangunan tanpa partisipasi aktif masyarakat terbukti telah gagal menjadikan

masyarakat semakin mandiri dan sejahtera, yaitu tidak lain karena akan melemahkan modal dan sistem sosial serta struktur ekonomi di tingkat mikro (Chaniago, 2001, Adrian, 1988). Adaptasi sosial masyarakat terhadap pelbagai perubahan yang tidak mendukung peningkatan kesejahteraan dan keadilan tentu akan semakin “menyudutkan” kehidupan masyarakat luas, khususnya yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan atau pembangunan nasional.

Penting untuk dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 dijelaskan hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun sebelumnya, dimana persoalan kemiskinan masih menjadi program wajib, diantaranya ketahanan pangan, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Untuk di Kota Tangerang Selatan masih menetapkan sejumlah 3 (tiga) kecamatan terkategori kampung miskin, yaitu Kampung Bulak Serua Kec. Ciputat, Kampung Bulak Timur Desa Kedaung Kec. Pamulang, Kampung Kanggan dan Kampung Koceak Desa Setu Kec. Setu (RPJM Kota Tangerang Selatan 2012). Dari keempat kampung tersebut umumnya dihuni oleh penduduk dari komunitas Betawi yang tergusur dari Propinsi DKI Jakarta dan atau pendatang baru (migran) yang menempati kontrakan/sewa dengan alasan harga sewa relatif terjangkau.

Konteks penetapan kampung miskin oleh Pemerintah Propinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan dimaksud menjadi pijakan studi ini untuk secara mendalam memahami sistem nilai, modal sosial, serta kebudayaan baru yang tercipta hasil perubahan pemekaran daerah. Yakni bermaksud mengkaji secara eksploratif komparatif pola adaptasi sosial masyarakat perkotaan di Tangerang Selatan terkait kebijakan pemekaran daerah baru, khususnya perubahan sistem mata pencaharian ekonomi sebelum dan sesudah pemekaran.

Tujuan penelitian ini secara umum adalah mengeksplorasi pola adaptasi sosial masyarakat perkotaan hubungannya dengan sistem mata pencaharian pada kampung miskin di Tangerang Selatan Propinsi Banten. Adakah perbedaan sebelum dan sesudah pemekaran dan apa saja pola adaptasi yang terbentuk di masyarakat paska perubahan daerah pemekaran baru tersebut. Kegunaan penelitian secara akademis adalah mendalami dan mengembangkan kajian pola adaptasi sosial dalam konteks kebijakan publik terhadap perubahan sosial di masyarakat miskin perkotaan. Kegunaan praktis riset ini menjadi sumbangsih alternatif pemikiran, pemetaan masyarakat dan kajian untuk kebijakan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan ketahanan ekonomi masyarakat miskin perkotaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik, melalui pendekatan survei kuantitatif (Neuman, Lawrence: 2013:108). Dimensi analisis berlatar eksploratif-komparatif (Ibid, h 109), yaitu membandingkan kondisi sebelum pemekaran dan sesudahnya tentang pola adaptasi sosial-ekonomi yang terbentuk pada warga masyarakat kampung miskin di Kota Tangerang Selatan. Teknik analisis menggunakan analisis faktor pembentukan adaptasi masyarakat dan tipologinya.

Populasi penelitian ini adalah seluruh warga yang tinggal di wilayah kampung miskin sebagaimana tercatat dalam dokumen RKPDP Propinsi Banten 2014, yaitu yang berusia 17 tahun ke atas atau telah menikah saat survei dilakukan. Dalam kenyataannya, warga Tangsel yang terpilih secara acak bertingkat pada wilayah kampung miskin ini ternyata juga dihuni oleh kalangan warga dengan tingkat ekonomi yang tergolong warga sejahtera, dan sejahtera plus. Meskipun demikian, semua responden terpilih

dalam riset ini tetap dijadikan sampel dan dianalisis sebagai bentuk gambaran utuh pola hubungan sosial ekonomi akibat perubahan sistem mata pencaharian paska pemekaran, pemetaan warga, dan sekaligus perbandingan antara penduduk miskin dan sejahtera di wilayah sasaran penelitian (kampung miskin di Tangsel).

Kerangka sampling ditetapkan sesuai proporsi kepadatan penduduk seluruh warga kampung miskin di 4 (empat) wilayah Kota Tangerang Selatan, yaitu yang bertempat tinggal di Kp. Bulak, Kp. Bulak Timur, Kp. Kranggan dan Kp. Krocek. Jumlah populasi penduduk yang tercatat di 3 kecamatan dimana 4 kampung tersebut berada adalah sejumlah 565. 00 warga. Sasaran sampel penelitian ini dipilih sebanyak 100 orang responden. Dengan tingkat kebenaran (db) 95 persen, maka margin of error survei ini adalah 9 persen.

Tabel 1. Proporsi Jumlah Populasi-Sampel

Kecamatan	Jumlah Populasi	%	Jumlah Sampel
Setu	69, 159	12. 24	20
Ciputat	199, 419	35. 29	30
Pamulang	296, 463	52. 47	50
	565, 041	100	100

Sumber: Data BPS Tangsel 2014

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode multi-stage random sampling, dengan proporsi gender berimbang 50:50 antara laki-laki dan perempuan. Setiap kecamatan dipilih sesuai proporsi jumlah penduduk. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh surveyor yang telah terlatih. Satu wawancara bertugas untuk satu kelurahan/desa yang terdiri hanya dari 10 responden (Kish, 1965). Waktu wawancara lapangan dilakukan selama kurang lebih 3 minggu secara bertahap yaitu 16 – 30 September 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonomi baru tentu perlu dikaji dari konteks sebelum dan sesudah pemekaran. Hal ini untuk memberikan pemahaman yang sama tentang laju pertumbuhan dan konteks masyarakat urban yang berkembang pada wilayah ini secara obyektif dan terukur.

1. Kota Tangerang Selatan Sebelum Pemekaran

Sebelum menjadi daerah otonom baru, Tangerang Selatan adalah bagian dari lingkup pemerintahan Kabupaten Tangerang. Dari 3 (tiga) wilayah utama (Ciputat, Serpong dan Pamulang) di Tangerang Selatan, 2 (dua) diantaranya memiliki nilai kesejarahan yang lebih kompleks, yaitu Ciputat dan Serpong. Awalnya Pamulang adalah salah satu kelurahan/desa di Ciputat, dan menjadi kecamatan tersendiri sejak sejak 1988 (Ace, 2014, Ridho, 2004), tetapi pertumbuhan Pamulang mengalami lonjakan yang luar biasa cepat terutama setelah munculnya perumahan/pemukiman untuk kalangan kelas menengah ke atas, yaitu Pamulang Permai dan Vila Pamulang Mas pada tahun 1992.

Sementara untuk Kecamatan Ciputat, adalah bagian dari Jakarta Selatan yang setelah terbit Inpres No. 13 Tahun 1976 tentang pengembangan wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi) menjadi bagian dari Jawa Barat dan sejak 2001 menjadi bagian dari Banten.

Pada wilayah Ciputat, berdiri kampus-kampus berkelas nasional dan internasional pada masa itu seperti Institut Agama Islam Negeri/IAIN (yang berganti nama menjadi Universitas Islam Negeri/UIN pada 2002) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang secara geografis berada di Ciputat. Disusul kemudian dengan kehadiran Universitas Muhammadiyah

Jakarta (UMJ) di Cirendeu Ciputat, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) Pisangan Ciputat, STIE Achmad Dahlan Cirendeu Ciputat dan Universitas Terbuka Pondok Cabe (Ace, 2014). Kampus Universitas Indonesia juga memiliki perumahan untuk dosen di Cirendeu Ciputat yang semakin melengkapi Ciputat sebagai wilayah perkotaan baru yang meskipun secara administratif berstatus kecamatan tetapi secara demografis telah merepresentasikan masyarakat urban (Ace, 2014).

Ciri masyarakat urban pada wilayah Ciputat juga bisa dilihat dari maraknya kompleks permukiman untuk pegawai negeri atau swasta yang bekerja di DKI Jakarta seperti diantaranya Komplek Perhubungan Udara Kampung Utan Ciputat, Komplek Departemen Kesehatan Ciputat, Komplek Departemen Perdagangan RI Ciputat, Komplek DPR RI Ciputat/Pamulang, Komplek Markas Besar Angkatan Darat Rempoa, Komplek Kejaksaan Agung Ciputat, Komplek Batan Pisangan Ciputat, Komplek Brimob Ciputat, Perumahan Bank Eksim/Mandiri Rempoa, dan banyak lagi lainnya. Dengan itu mengindikasikan awal Ciputat sebagai sentra penduduk migrasi sirkuler telah tumbuh sejak era 80-90an, yang tentunya menopang Propinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini hemat penulis melampaui wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Tangerang. Selain kegiatan buruh pabrik Sadratex Rempoa Ciputat, di era 90-an juga bisa dicermati dari berdirinya Mall Ramayana dan Mall Borobudur, Toko Buku Gunung Agung, Cinema 21 Borobudur, Bioskop Niagara, Pamulang 21, Rumah Pulau Situ Gintung, yang kala itu dapat dikatakan menjadi magnet atau pusat perekonomian bagi wilayah-wilayah sekitar seperti Bintaro, Ciledug, Parung, Sawangan, Pesanggerahan, dan Serpong. Tak heran sejak tahun 80-an,

Ciputat telah mulai dikenal dengan wilayah macet karena pesatnya perekonomian di wilayah ini, terutama di pasar Ciputat yang secara bersamaan dijadikan sebagai terminal angkot dan bus kota. Pada kecamatan ini pula (sebelum kemudian menjadi bagian Pamulang) terdapat Bandar Udara Pondok Cabe yang awalnya merupakan bandar udara militer, tetapi kemudian juga difungsikan untuk komersial (Ace, 2014).

Selain Pamulang dan Ciputat, Serpong adalah wilayah yang cukup dikenal luas terutama dengan keberadaan Institut Teknologi Indonesia (ITI) Serpong, yang sudah berdiri sejak tahun 1983, dan pada era 90-an berdiri beragam perguruan tinggi seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Akademi Meteorologi dan Geofisika, Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Swiss German, Prasetiya Mulya Business School, Kampus Edutown BSD, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Bina Nusantara. Selain bergengsi, kampus-kampus tersebut umumnya telah berstandar internasional (Ace, 2014).

Serpong menjadi semakin dikenal sebagai wilayah urban terutama setelah kemunculan model pemukiman “smart city” Bumi Serpong Damai (BSD). Model hunian baru yang asri, berkelas dan dilengkapi dengan konsep penataan ruang kota yang bertaraf internasional menempatkan kecamatan ini tak ubahnya seperti “kota baru” di tengah Kab. Tangerang. Pada 2003, proyek raksasa BSD City sepenuhnya dikelola oleh Sinarmas Developer and Real Estate, menyediakan berbagai sarana olah raga mulai dari lapangan tenis, kolam renang,

lapangan golf, Ocean Park, thematic water adventure terbesar di Asia Tenggara, pasar modern serta sejumlah pusat perbelanjaan juga telah beroperasi di sini.

Dapat disimpulkan Tangerang Selatan sebelum pemekaran telah menjadi wilayah modern atau kampung modern dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Karena itu secara demografis masyarakatnya adalah masyarakat modern atau perkotaan sehingga mendorong pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat. Utamanya setelah munculnya sejumlah perumahan besar seperti Lippo Village, Gading Serpong, Sentul City, Lippo Cikarang, Jababeka, dan Kota Harapan Indah. Sejak awal 2000-an selatan Kabupaten Tangerang menjelma menjadi kawasan yang paling diminati bagi para pendatang.

2. Kondisi Tangerang Selatan Paska Pemekaran

Pembentukan daerah otonomi baru secara resmi tertuang dalam UU Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangsel melalui Sidang Paripurna DPR-RI. Kota Tangerang Selatan diputuskan terdiri dari wilayah Kec. Setu, Kec. Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Pamulang, Ciputat, dan Ciputat Timur. Sejak 29 Oktober 2008, Kota Tangerang Selatan telah resmi menjadi daerah otonomi baru yang menjadi bagian dari Provinsi Banten. Pembentukannya selain karena jumlah penduduknya yang semakin padat, adalah juga laju pertumbuhan ekonomi yang pesat, karena itu selayaknya didukung oleh layanan administratif dan pengelolaan daerah yang mandiri (Dokumen Bakor Cipasera, 2005: 4).

Tabel 2. Perubahan Pertambahan Penduduk Aktual dan Proyeksinya di Kab. Tangerang/Tangerang Selatan Banten Tahun 2007-2012 Menurut Kategori Kecamatan

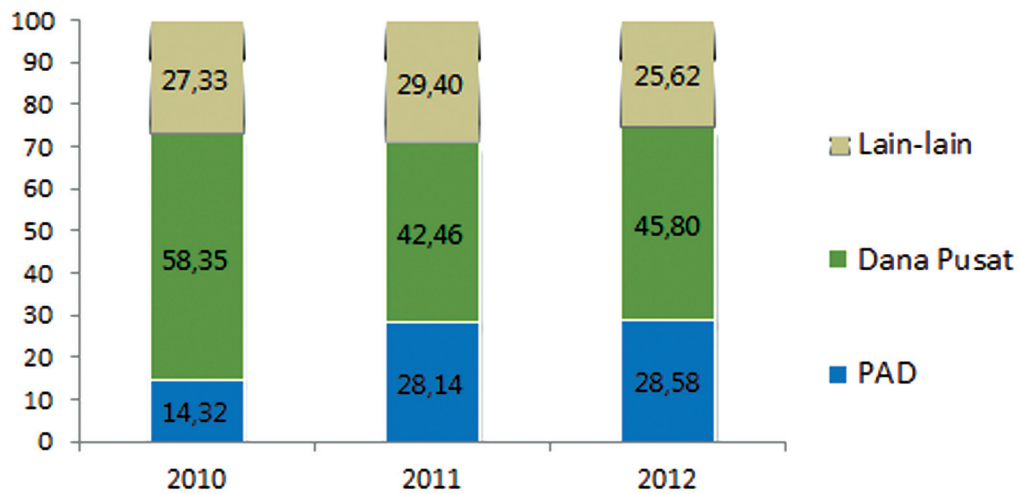
WILAYAH (Kecamatan)	TAHUN/PERIODE				PERUBAHAN			
	2007		2012		Total Penduduk		Rasio Jenis/Sex	
	Total Penduduk	Rasio Jenis/Sex	Total Penduduk	Rasio Jenis/Sex	Jumlah	%	Jumlah	%
Serpong	100.355	102,02	143.777	98,95	43.422	43.27	-3.070	-3.01
Serpong Utara	77.399	98,39	133.471	99,75	56.072	72.45	1.360	1.38
Setu	56.419	104,39	69.159	105,18	12.740	22.58	0.790	0.76
Pamulang	248.201	102,92	296.463	102,51	48.262	19.44	-0.410	-0.40
Ciputat	161.726	105,13	199.419	104,00	37.693	23.31	-1.130	-1.07
Ciputat Timur	160.404	100,37	184.304	102,01	23.900	14.90	1.640	1.63
Pondok Aren	246.870	103,68	316.025	103,00	69.155	28.01	-0.680	-0.66
Total	829.191	102,41	1.342.618	102,25	513.427	61.92	-0.160	-0.16

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Periode 2007/2008 hal. 48 dan BPS Kota Tangerang Selatan Periode 2011/2012 hal. 49

Kota Tangerang Selatan pasca pemekaran tentu tidak dapat lepas dari konteks sebelum pemekaran. Artinya, sebelum pemekaran wilayah ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan demografi yang pesat. Jika dilihat dari pertumbuhan PAD di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010 tercatat sejumlah Rp. 131.500.021.623 atau meningkat 319 persen, dengan kata lain meningkat 3 kali lipat dari 2 tahun sebelum pemekaran. Demikian juga pada tahun 2012 yang terus bertambah menjadi Rp. 420.663.048.857 atau terjadi pertumbuhan sebesar 105 persen. Dapat disimpulkan terdapat kecenderungan kontribusi perbaikan kinerja sistem pemerintahan yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan (Ace, 2014).

Gambaran di atas tentu bukan kondisi aktual pendapatan daerah “yang sesungguhnya” karena jika dicermati kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan daerah (APBD) dalam hitungan rata-rata masih berkontribusi sebesar 23.68 persen saja. (Profil APBD 2012 Dirjen Perimbangan Keuangan, 2012: hal. 5). Demikian juga kontribusi dana lainnya yang diperoleh dari pajak provinsi dan pemerintah lainnya (dana otonomi khusus, dana hibah dan dana bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah lainnya) juga mengalami penurunan sebesar sebesar 1,71 persen. Bandingkan antara sistem keuangan daerah periode 2010-2011 dan 2011-2012 yang tidak meningkat secara tajam sebagaimana pada tahun sebelumnya.

Grafik 1. Perbandingan PAD, Dana Perimbangan (Pusat) dan Dana Lainnya di Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2012



Sumber: Diolah dari data BPS Kota Tangerang Selatan Periode 2011/2012 hal. 247 dan Profil Tangerang Selatan Tahun 2012 hal. 66

Berdasarkan indeks kapasitas fiskal, kriteria daerah terbagi dalam empat kategori kelompok, yaitu sangat tinggi (memiliki indeks 2, 0 atau lebih), tinggi (1, 0 hingga kurang dari 2, 0), sedang (0, 5 hingga kurang dari 1, 0), dan rendah (kurang dari 0, 5). Pada daerah yang terkategori rendah dapat dikatakan selain kecukupan keuangan daerahnya terbatas adalah juga menunjukkan tingkat kinerja bupati/ walikota bersangkutan juga rendah dalam hal kemampuan mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang lebih baik. Hal tersebut didasarkan pada formula perhitungan kapasitas fiskal yang memperhatikan variabel penganggaran belanja pegawai dan angka kemiskinan. Jika angka kemiskinan makin tinggi maka kapasitas fiskalnya pun juga menjadi rendah, termasuk jika anggaran belanja pegawai tinggi, maka kontribusi terhadap kapasitas fiskalnya turut menjadi rendah. Artinya, jika kapasitas fiskal suatu daerah masih rendah maka perhatian terhadap penurunan masalah angka kemiskinan belum tuntas dilakukan oleh

pemerintah daerah bersangkutan. Selain itu dapat juga dikatakan pemerintah daerahnya masih me-orientasikan pendapatan daerah sebatas untuk belanja pegawai, karenanya belum secara optimal menggali potensi daerah sehingga PAD-nya terpantau “terbatas”.

Akan tetapi sebagai kota baru, Tangerang Selatan secara mengejutkan mampu menunjukkan performa keuangan daerah yang lebih baik, bahkan hampir sejajar dengan kota Cilegon atau bahkan meninggalkan Kota Tangerang yang lebih awal dimekarkan (1993). Kondisi keuangan daerah pada Kabupaten Tangerang menunjukkan kondisi yang terbalik, yaitu makin menurun sehingga ditinggalkan oleh wilayah hasil pemekarannya, yaitu Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Kondisi keuangan Kabupaten Tangerang sebelum dan sesudah pemekaran tampak stagnan atau bahkan tanpa kemajuan berarti. Hal serupa dengan Kota Tangerang yang belum menunjukkan angka kecukupan fiskal yang sehat atau makin membaik, kecuali pada tahun 2010.

Tabel 3. Perbandingan Perubahan Kapasitas Fiskal Kota Tangerang Selatan

TAHUN	KAPASITAS FISKAL	Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang	Kab. Tangerang	Kota Cilegon	Prov. Banten
2009	Indeks	0,3609	0,4591	0,3609	2,2567	0,8514
	Kategori	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang
2010	Indeks	0,4178	0,5893	0,4178	2,2370	0,6299
	Kategori	Rendah	Sedang	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang
2011	Indeks	2,1550	0,3305	0,2790	1,6697	0,7440
	Kategori	Sangat Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang
2012	Indeks	2,3061	0,2777	0,3064	1,4963	0,7023
	Kategori	Sangat Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang
Rata-rata		1,79625	0,3688	0,3274	1,8312	0,694625
Kategori		Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 174/PMK. 07/2009; No. 245/PMK. 07/2010; No. 244/PMK. 07/2011; No. 226/PMK. 07/2012

Meskipun tidak cukup kredibel membandingkan Tangerang Selatan dengan kota-kota penyanggah lainnya di lingkup Jabodetabek. Tetapi sebagai gambaran awal terkait apakah wilayah ini potensial berkontribusi mendukung pembangunan wilayah sentral Ibukota atau sebaliknya. Menurut penulis, Tangerang Selatan tampaknya memiliki kecukupan fiskal yang memadai sebagai daerah penyanggah yang mampu berkontribusi dan turut mengimbangi pembangunan ibukota DKI Jakarta.

Dibanding kota-kota daerah pemekaran baru lainnya kecukupan keuangan daerah Tangerang Selatan tergolong rata-rata tinggi, sementara kota-kota lainnya tergolong rendah dan sedang. Artinya, alokasi pengurangan kemiskinan dan belanja pegawai “seyogyanya” dapat dicukupi dari APBD, dengan tetap mampu melakukan belanja modal untuk pengembangan kota menjadi lebih maju. Terlebih permasalahan sosial yang melingkupinya tentu belum sekompleks Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tangerang yang sudah lama berdiri. Dugaan kuat lainnya adalah kondisi ketersediaan infrastruktur kota yang umumnya telah tersedia sebelum kota Tangerang Selatan terbentuk

sehingga belanja modal untuk infrastruktur kota “dibantu” secara signifikan oleh pihak swasta dan pemerintah sebelumnya. Artinya, kecukupan fiskal Kota Tangerang Selatan besar kemungkinan dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur kota seperti jalan kota/lingkungan, pemukiman, tempat wisata, dan fasilitas publik lainnya yang telah tumbuh kembang secara pesat sebelum pemekaran Kota Tangerang Selatan.

Dengan demikian catatan penulis adalah meskipun terjadi pertumbuhan Kota Tangerang Selatan yang makin menunjukkan kemajuan yang signifikan tidak dipengaruhi oleh kinerja pemerintah kota *Ansich*. Konteks Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah yang secara ekonomi dan sosial telah berkembang secara pesat sebelum pemekaran “diterapkan” penting dijadikan latar belakang keberhasilan Kota Tangerang Selatan saat ini dan atau ke depan.

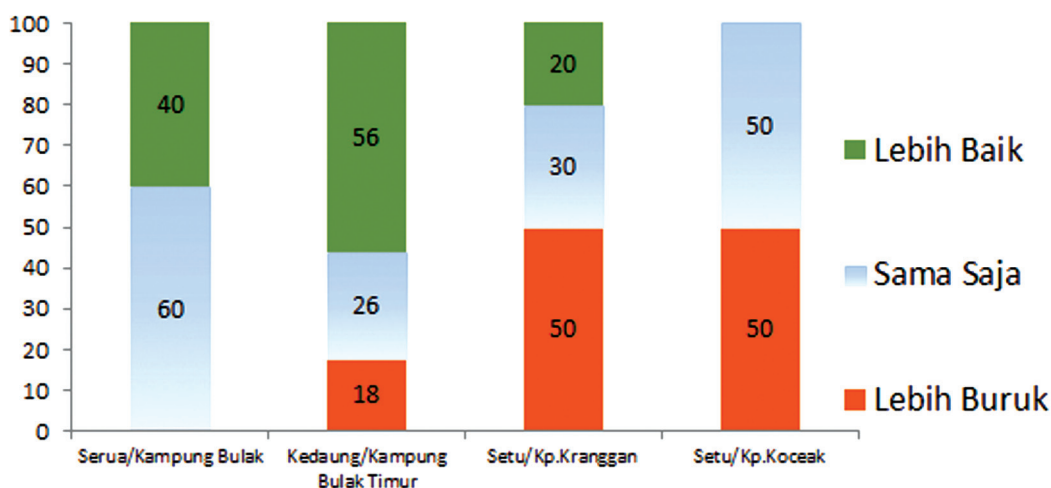
3. Kemampuan Beradaptasi di Kota Tangerang Selatan

Bertahan (*survive*) pada wilayah urban merupakan suatu tantangan tersendiri bagi setiap individu dan masyarakat baik

secara alamiah dan atau terencana. Secara alamiah artinya bertahan “seadanya” atau sesuai kemampuan yang dimiliki untuk sekedar mencukupi kebutuhan pokok seperti makan keseharian bagi diri sendiri dan keluarganya. Sementara bertahan hidup secara terencana dimaksudkan sebagai upaya sadar memperbaiki kualitas hidup di tengah suasana krisis yang dihadapi masyarakat luas termasuk dirinya dan keluarga agar sekurangnya tetap hidup dengan standar yang layak (Allison, et al, 2001). Artinya, seseorang dengan kapasitas dan keahlian yang memadai memiliki peluang dan kesempatan untuk tetap hidup layak dalam situasi sulit.

Individu yang merasa memiliki keahlian memadai dalam mendapatkan pekerjaan secara psikologis merupakan bagian dari bentuk kepercayaan diri yang sehat dalam hal mengenali dirinya sendiri (Calhoun dan Acocella, 1990). Dengan itu seseorang akan dapat menghargai dan mempercayai dirinya mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Sebaliknya seseorang yang merasa lemah atau tidak mampu menghadapi realitas kesehariannya adalah bagian dari pengenalan diri yang negatif dan karenanya rumit dalam menentukan masa depan hidupnya sehingga ia sulit menemukan cara hidup yang tepat dalam menghadapi situasi kompleks. (Rachmat 2009, Pudjijoyanti 1995).

Grafik 2. Respon Warga Tangerang Selatan terhadap Perubahan Perekonomian Sebelum dan Sesudah Pemekaran



Sumber: Diolah dari data primer 2015

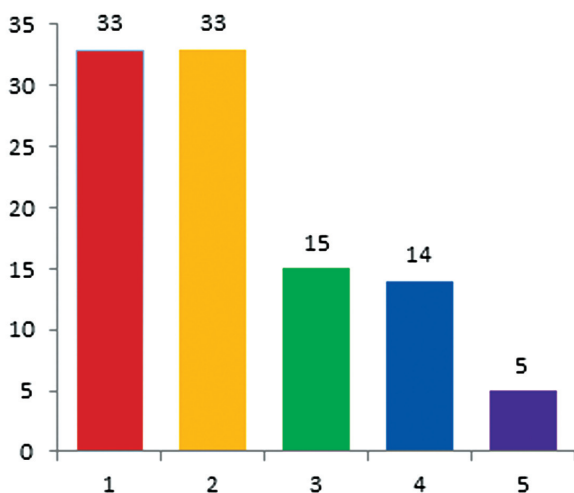
Dalam riset ini responden ditanyakan tentang apakah keahlian dan kecakapan yang dimilikinya telah dipandang mencukupi atau memadai dalam upaya mendapatkan lapangan pekerjaan di lingkungannya. Asumsi yang menjadi batasan penulis adalah melalui pertanyaan ini responden dapat mengenali dirinya (tahu), dan mampu menilai dirinya sendiri apakah dapat beradaptasi dalam

mendapatkan pekerjaan atau tidak. Karena itu jawaban ini secara umum dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi psikologis responden dalam hal mengenali dan menilai apakah ia mampu mendapatkan pekerjaan atau tidak, sehingga semakin ia merasa memiliki keahlian yang mencukupi maka semakin mampu mengatasi kerumitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungannya.

Jawaban yang didapatkan adalah sebagai berikut. Terdapat sejumlah 66% responden yang menyatakan merasa tidak atau kurang mampu bersaing mendapatkan pekerjaan di Kota Tangerang Selatan, sementara sejumlah 29 persen merasa memiliki keahlian yang memadai sehingga cukup mampu bersaing mendapatkan pekerjaan, dan selebihnya 5 persen menyatakan merasa memiliki keahlian yang memadai/mumpuni dalam bersaing mendapatkan pekerjaan di wilayahnya. Gambaran profil responden tersebut menegaskan sebagian besar

masyarakat memang tidak merasa percaya diri dengan keahlian dan kecakapan yang dimilikinya, sehingga merasa sulit bersaing dengan lainnya dalam hal mendapatkan pekerjaan di Kota Tangerang Selatan (66%). Artinya kepercayaan diri baik sebagai individu dan anggota masyarakat pada warga miskin Tangsel terkategori sulit atau tidak mampu beradaptasi secara baik, atau sekedar melakukan penyesuaian diri secara alamiah saja, tanpa harus tahu apakah ke depannya dapat sukses atau sebaliknya.

Grafik 3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah kondisi Anda (Keahlian dan Kecakapan) yang dimiliki saat ini dipandang telah memadai atau mencukupi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang ada di Tangerang Selatan



1. Saya merasa tidak memiliki kemampuan yang memadai
2. Saya merasa memiliki kemampuan yang terbatas untuk bersaing mendapatkan pekerjaan
3. Saya merasa cukup memiliki kemampuan yang memadai, meski tidak mudah bersaing dengan yang lain
4. Saya merasa cukup memiliki kemampuan yang memadai
5. Saya merasa sangat ahli/mumpuni di bidang tertentu yang saya kuasai, sehingga mudah bekerja dengan siapapun

Sumber: Diolah dari data primer 2015

Jika ditelaah melalui latar belakang pendidikan responden, maka mereka yang menjawab tidak atau kurang mampu bersaing (66%) tersebut adalah keseluruhannya berasal dari lulusan SLTA ke bawah, sementara yang menjawab mampu bersaing mendapatkan pekerjaan dengan keahlian yang dimilikinya (5%) adalah dari mereka yang berlatar belakang SLTA ke atas. Sementara kategori 29 persen yang merasa cukup mampu beradaptasi berasal dari beragam latar belakang pendidikan (rendah-tinggi). Artinya dapat dipahami bahwa

faktor pendidikan menjadi salah satu aspek penting yang menentukan kepercayaan diri seseorang dalam upaya bersaing mendapatkan jenis pekerjaan tertentu di lingkungannya. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin ia percaya diri dalam mendapatkan pekerjaan yang layak baginya.

Akan tetapi catatan penting dari riset ini adalah meskipun kepercayaan dirinya tergolong umumnya rendah bukan berarti mereka tidak bekerja. Ketidakpercayaan diri seseorang yang

dimaksudkan dalam konteks ini adalah dalam hal bersaing memperoleh pekerjaan yang dipandang layak menurut penilaian masyarakat. Karena mereka yang merasa sulit bersaing mendapatkan pekerjaan yang layak tetap memiliki motivasi untuk bekerja (apapun). Ini artinya masyarakat masih memiliki persepsi yang positif terhadap dirinya untuk “tetap mencari nafkah atau mencukupi kebutuhan kesehariannya” meski dalam situasi dan kondisi sulit (persaingan yang kompetitif).

Individualitas dan sosialitas yang rendah di atas tergambar pula dari jenis pekerjaan masyarakat Tangsel yang cenderung mengarah pada pilihan jenis pekerjaan tersier (BPS Tangsel 2015). Yakni dari sistem mata pencaharian bertani menuju industri, barang dan jasa. Latar pekerjaannya pun beragam, mulai dari penduduk lokal setempat, migran tetap dan sirkuler, termasuk pekerja asing. Berikut perbandingan data pertumbuhan pekerja di Tangerang Selatan menurut data BPS tahun 2010-2014 Kota Tangerang Selatan:

Tabel 4. Jumlah Perusahaan Berdasarkan Tenaga Kerja

PERUSAHAAN		Tenaga Kerja			
		WNI		WNA	
2009	2013	2009	2013	2009	2013
499	1,696	46,402	102,847	92	818
Meningkat 340%		Meningkat 222%		Meningkat 889%	

Sumber: Diolah dari BPS Kota Tangsel 2010-2014

Tabel 5. Jumlah Perusahaan Berdasarkan Sektor Kerja

SEKTOR	Jumlah Perusahaan			
	2009	2013	Selisih	%
Pertanian Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	5	5	0	0
Pertambangan dan Penggalian	2	7	5	250
Industri Pengolahan	51	115	64	125
Listrik, Gas dan Air Bersih	5	4	-1	-20
Bangunan	19	52	33	174
Perdagangan, Hotel dan Restoran	223	763	540	242
Pengangkutan dan Komunikasi	17	29	12	71
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	105	540	435	414
Jasa-jasa	72	181	109	151
Jumlah	499	1,696	1,197	240

Sumber: Diolah dari BPS Kota Tangsel 2010-2014

Dapat dipahami melalui data di atas, saat ini Kota Tangerang Selatan bercirikan masyarakat urban yang lebih berorientasi pada pengembangan sumber ekonomi berbasis industri dan jasa, dibanding pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian (sumberdaya alam). Perubahan pesat tersebut sekaligus semakin menegaskan konteks “ketidak-

siapan” masyarakat miskin perkotaan dalam mendapatkan pekerjaan secara kompetitif di wilayah ini. Karena itu pentingnya kebijakan penguatan sumberdaya manusia lokal yang kompetitif, inovatif dan berkesinambungan seperti ekonomi kreatif misalnya dapat menjadi alternatif agar tetap bersinergi dengan perubahan sumber mata pencaharian yang terus berkembang menuju wilayah industri dan jasa.

4. Pola Adaptasi Masyarakat

Seseorang atau kelompok yang memiliki kesadaran atas kondisi perekonomian yang tidak biasa dihadapinya akan secara mudah menyesuaikan dengan situasi baru yang baru. Yaitu apakah ia akan memperbaiki, membiarkan, atau menolak kebijakan perekonomian yang baru tersebut. Riset ini mendapatkan tiga klasifikasi utama terkait pola penyesuaian masyarakat terhadap perubahan sistem mata pencaharian di Tangerang Selatan. Pertama, adalah individu atau masyarakat yang cepat menyesuaikan dengan situasi baru, mampu mengatasi dan menyesuaikan halangan-tantangan yang ada di lingkungannya, meskipun tidak selalu berhasil memanfaatkan sumber-sumber perekonomian yang tersedia. Kedua, sulit melakukan penyesuaian dengan norma-norma baru, atau tidak mampu menyesuaikan dengan ketegangan-ketegangan elit-politis yang terjadi, meskipun mereka yang juga tak mampu menolak/tidak berdaya denganpelbagai perubahan yang terjadi. Ketiga, menolak perubahan dan tidak bersedia menyesuaikan

dengan keadaan yang ada meski tetap hidup bersama baik secara sosial dan ekonomi. Uniknya mereka yang dalam kategori ini adalah masyarakat dengan status sosial menengah ke-atas, atau tingkat pendapatan yang layak, atau di atas 4 juta ke-atas. Kategori ketiga ini adalah model penyesuaian “terbaru” yang nampaknya khas pada masyarakat urban.

- Kriteria1: Menerima Perubahan dan Terpaksa Menyesuaikan

Gambaran umum dari kategori masyarakat tipe pertama ini adalah mereka yang mudah menerima situasi baru yang dihadapi. Yakni (1) masyarakat masih memiliki kemauan untuk memperbaiki norma yang menyimpang, (2) kesejahteraan ekonomi dipercaya akan semakin membaik, dan (3) setuju jika masyarakat memiliki kemampuan untuk selalu menyesuaikan dengan situasi perekonomian terbaru paska pemekaran Kota Tangerang Selatan. Kategori masyarakat ini adalah yang terbanyak, yaitu sejumlah 53 persen.

Tabel 6. Kriteria Masyarakat Perkotaan Pertama

KRITERIA MASYARAKAT _1		%	Kesimpulan
PERTANYAAN	JAWABAN		
Apakah penyimpangan sosial/pudarnya norma masyarakat yang terjadi merupakan hal biasa dan dapat diperbaiki secara mandiri oleh masyarakat atau tidak?	Masyarakat masih memiliki kearifandan kemauan untuk memperbaiki norma yang menyimpang		
Apakah masyarakat mampu menyelesaikan dampak dari perubahan perekonomian yang terjadi setelah pemekaran (Tangerang menjadi Tangerang Selatan)?	Kesejahteraan ekonomi masyarakat Tansel akan terus meningkat, jika saat ini sedang krisis ekonomi, masyarakat percaya ke depan dapat kembali norma/ stabil	53	POSITIF
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, masyarakat mampu menyesuaikan dengan segala akibat dari perubahan ekonomi paska pemekaran?	Setuju		

Sumber: Diolah dari data primer 2015

Karakteristik menerima perubahan dengan asumsi masyarakat dipandang memiliki mekanisme untuk memperbaiki norma-norma sosial yang dipandang

menyimpang dari kebudayaan umum (*universal*), baik yang bersifat patologis atau akibat langsung dan tidak langsung dari perubahanlingkungan sosial

kemasyarakatan paska pemekaran. Dengan demikian, masyarakat secara umum masih mempercayai kebijakan perekonomian yang dikelola oleh pemerintahan Kota Tangerang Selatan saat ini.

Kesejahteraan dalam pandangan masyarakat ini dipahami tidak hanya peningkatan pendapatan (finansial) tetapi juga kepedulian sosial dan pola interaksi yang sehat antar warga masyarakat. Tidak dipungkiri adanya proses integrasi antar kebudayaan lintas suku-bangsa yang secara nyata mempengaruhi pola komunikasi dan interaksi sehingga melahirkan kultur baru yang tidak mudah diinternalisasi oleh setiap anggota masyarakat. Tetapi secara bertahap mereka meyakini akulturasi kebudayaan

lintas etnis dan agama justru menegaskan identitas masyarakat baru yang saling menguatkan.

- Kriteria 2: Kritis Terhadap Perubahan dan Lambat Menyesuaikan

Masyarakat dengan kategori mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, meskipun lambat mengambil keputusan untuk melakukan perubahan. Karakteristik masyarakat pada kelompok ini adalah (1) masyarakat masih mungkin diperbaiki jika ada kemauan bersama, (2) Sulit percaya pada pemerintah terhadap perbaikan ekonomi, dan (3) setuju masyarakat mampu memperbaiki perekonomiannya. Kategori masyarakat pada kelompok ini yang terbanyak kedua sejumlah 21 persen.

Tabel 7. Kriteria Masyarakat Perkotaan Kedua

KRITERIA MASYARAKAT _2		%	Kesimpulan
PERTANYAAN	JAWABAN		
Apakah penyimpangan sosial/pudarnya norma masyarakat yang terjadi merupakan hal biasa dan dapat diperbaiki secara mandiri oleh masyarakat atau tidak?	Penyimpangan norma masyarakat masih mungkin diperbaiki, jika ada kemauan bersama seluruh masyarakat (Meski sulit)		
Apakah masyarakat mampu menyelesaikan dampak dari perubahan perekonomian yang terjadi setelah pemekaran (Tangerang menjadi Tangerang Selatan)?	Kesejahteraan ekonomi semakin sulit ke depannya, krisis ekonomi akan makin parah, masyarakat sulit percaya pada pemerintah	21	Negatif 01
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, masyarakat mampu menyesuaikan dengan segala akibat dari perubahan ekonomi paska pemekaran?	Setuju		

Sumber: Diolah dari data primer 2015.

Karakteristik masyarakat kategori kedua ini memiliki tingkat kepercayaan pada kemampuan masyarakat menyelesaikan problematika sosial yang dipandang menyimpang cukup rendah. Artinya, menunggu pihak lain melakukan sesuatu yang normal atau ideal untuk menggerakkan masyarakat yang lebih luas memperbaiki situasi sosial yang dipandang kompleks atau rumit tersebut. Terlebih pada kemampuan pemerintah untuk memperbaiki situasi

perekonomian yang dalam pandangan masyarakat ini cenderung semakin krisis ke depannya. Meskipun secara umum, masyarakat tetap masih mampu menyesuaikan segala akibat yang terjadi sebagai dampak dari pemekaran wilayah Tangerang Selatan.

Dalam konteks pola adaptasi pada masyarakat kategori ini modal sosial dipandang tak mampu menggerakkan

perekonomian setempat. Pola hubungan antar masyarakat diasumsikan cenderung pragmatis, sehingga kepedulian pada sesama dipandang sebatas sebagai “hubungan kasih sayang” atau kesalehan sosial yang bersifat sangat pribadi (individual). Karena itu dalam situasi ini sulit memaksimalkan potensi budaya lokal dalam menghadapi kesulitan yang lebih besar (Lawang, 2004).

Hal tersebut kuat kemungkinan akibat minimnya pola komunikasi yang menumbuhkan kepedulian yang produktif antar warga urban. Terlebih konteks warga urban yang tinggal di wilayah ini tidak semuanya menetap atau tinggal dalam kurun waktu lama. Sehingga masyarakat pada kategori ini cenderung menunggu inisiasi perubahan pihak lain dan mengikut

pandangan dan pola hidup dari khalayak secara pasif.

- Kriteria 3: Menolak Perubahan dan Sulit Menyesuaikan

Masyarakat dengan kategori menolak perubahan dan sulit menyesuaikan, adalah kategori yang ketiga. Yakni karakteristik masyarakat (1) masyarakat yang menganggap sulit memperbaiki penyimpangan yang ada dan menganggap hal tersebut kebiasaan baru, (2) Sulit percaya pada pemerintah terhadap perbaikan ekonomi dan perekonomian makin memburuk, serta (3) setuju masyarakat tidak mampu memperbaiki perekonomiannya. Kategori masyarakat pada kelompok ini sejumlah 18 persen atau paling sedikit

Tabel 8. Kriteria Masyarakat Perkotaan Ketiga

KRITERIA MASYARAKAT _3		%	Kesimpulan
PERTANYAAN	JAWABAN		
Apakah penyimpangan sosial/pudarnya norma masyarakat yang terjadi merupakan hal biasa dan dapat diperbaiki secara mandiri oleh masyarakat atau tidak?	Penyimpangan norma masyarakat adalah hal biasa, terjadi pada semua masyarakat		
Apakah masyarakat mampu menyelesaikan dampak dari perubahan perekonomian yang terjadi setelah pemekaran (Tangerang menjadi Tangerang Selatan)?	Kesejahteraan ekonomi semakin sulit ke depannya, krisis ekonomi akan makin parah, masyarakat sulit percaya pada pemerintah	18	Negatif 02
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, masyarakat mampu menyesuaikan dengan segala akibat dari perubahan ekonomi paska pemekaran?	Kurang Setuju		

Sumber: Diolah dari data primer 2015

Dampak serius dari akulturasi budaya pada masyarakat urban adalah hilangnya identitas masing-masing kebudayaan, berganti dengan kultur baru atau terbiasa dengan tiadanya aturan/tradisi yang bersumber dari kebudayaan “sebelumnya” atau yang dominan. Ini adalah bentuk “adaptasi” yang tak terhindarkan utamanya bagi kalangan masyarakat berpendidikan tinggi atau justru tidak berpendidikan tinggi/ tidak bersekolah formal.

KESIMPULAN

Pada konteks zona wilayah kampung miskin di Tangerang Selatan ternyata telah juga dihuni oleh kalangan menengah ke atas (sejahtera dan plus) yang justru kurang-tidak mampu beradaptasi dengan masyarakat di sekitarnya. Karena itu terindikasi adanya typologi dan situasi suatu masyarakat akibat perubahan situasi sosial-ekonomi sebagai berikut.

Pertama, modal sosial sebagai energi

positif yang dipandang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat lokal tidak terbukti berpengaruh secara langsung bagi peningkatan pendapatan ekonominya. Terlebih hampir sebagian besar menyatakan merasa tidak memiliki keahlian memadai untuk berkompetisi mendapatkan lapangan pekerjaan yang tersedia, berpendidikan terbatas (rata-rata SLTP/SLTA), dan kurangnya kepedulian untuk bekerjasama secara produktif. Umumnya lebih memilih pekerjaan yang lazim dilakukan masyarakat sekitar, ekspektasi lapangan pekerjaan yang diharapkan juga sebatas untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek, diantaranya pedagang, buruh/karyawan, dan jenis pekerjaan dengan tanpa keahlian khusus yang rumit, atau terpenting dapat tetap bertahan hidup.

Kepedulian pada yang lain sebagai bagian dari modal sosial masih mengarah pada sikap berempati, mau mendengar keluhan yang lain, berpikir positif, dan memberikan apresiasi atas apa yang dihadapi pihak lain. Tetapi belum mengarah pada sikap mentalitas seperti merasa berkelimpahan atau tidak pelit, berorientasi melayani untuk sama-sama mendapatkan solusi, selalu membuat orang lain bergembira (Ancok, 2003). Artinya, ada kecenderungan siap sedia mendengar keluh-kesah yang lain meski tak selalu mampu memberikan bantuan atau solusi yang bermanfaat bagi yang lain. Kecuali jika pihak yang berkeluh kesah memberikan dampak yang berpeluang ekonomis ke depan.

Kedua, modal sosial tidak selalu dapat berdampak positif, tetapi juga negatif, khususnya bagi kalangan masyarakat yang memiliki kepedulian sosial rendah atau tingkat apatisisme pada pemerintahan setempat sangat tinggi. Meskipun jumlah kalangan masyarakat ini terbatas atau sedikit, tetapi dapat menjadi kendala yang mengkhawatirkan bagi upaya pembangunan masyarakat yang harmonis,

khususnya jika pemerintah setempat (Kota Tangerang Selatan) dipandang/dievaluasi berkinerja buruk.

Uniknya adalah meskipun umumnya masyarakat masih menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Kota Tangerang Selatan saat ini (paska pemekaran), tetapi bukan berarti Pemerintah Kota dipandang turut berkontribusi bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan kata lain semakin tingginya kepercayaan publik pada pemerintah Kota bukan secara langsung meningkatkan pendapatannya. Karena peningkatan kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh keahlian, situasi pasar (ekonomi) di Tangerang Selatan, dan pola komunikasi antar warga yang produktif dan keyakinan terhadap peluang masa depan yang lebih baik.

Secara teoritis dapat disimpulkan bahwasanya modal sosial tidak dapat berfungsi pada masyarakat urban jika tidak ditopang oleh aspek kualitas pendidikan, situasi perekonomiannya mendukung (percaya pada pemerintahan daerah) dan tingkat kesejahteraannya yang layak sekurangnya sejahtera II ke atas.

Ketiga, karena itu secara praktis, pendampingan peningkatan perekonomian masyarakat miskin perkotaan melalui peningkatan dana desa misalnya penting menguatkan “identitas kultural baru” yang secara evolutif terbentuk sebagai akibat pola migrasi penduduk baru, dengan upaya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat lokal. Tanpa dukungan pelibatan bersama masyarakat, perekonomian masyarakat miskin perkotaan akan sulit meningkat. Dukungan pemerintah daerah tidak sebatas administratif saja, tetapi penting berbasis pranata sosial yang secara alamiah dikembangkan masyarakat.

Keempat, adaptasi sosial adalah proses mengenal situasi baru yang belum membentuk menjadi tatanan sosial, norma, etika tertentu. Karena itu melalui pola adaptasi baru dimungkinkan tumbuh ragam perilaku baru, penyesuaian baru, pembiasaan baru hingga membentuk sistem sosial baru. Deteksi terhadap pola interaksi baru yang berpeluang menjadi pembiasaan perilaku baru dapat mencegah tumbuhnya sistem perilaku menyimpang yang cenderung meluas, atau menjadi trend baru yang dibiasakan.

SARAN

Berikut saran yang dapat diberikan: Kepada Warga Kampung Miskin Tangsel, penting digiatkan peran institusi lokal guna menumbuhkan kepedulian sosial yang produktif secara langsung bagi peningkatan perekonomian. Kepada Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, penting menetapkan dan mensosialisasikan kebudayaan daerah resmi Kota Tangerang Selatan sebagai identitas kultural Tangsel, meningkatkan perekonomian “primer” yang kompetitif dan berbasis partisipasi warga. Kepada akademisi dan peneliti berikutnya, penting mengkaji dengan jumlah populasi yang lebih luas, agar lebih menggambarkan keseluruhan konteks penduduk Kota Tangerang Selatan. Selain itu menguji modal sosial secara komparatif pada wilayah urban yang diduga mampu berkontribusi signifikan terhadap pengembangan perekonomian lokal seperti di wilayah Bali, Yogyakarta atau wilayah lainnya yang serupa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan jajarannya yang telah memberikan dana riset untuk pengembangan kajian ini. Termasuk kepada seluruh Lurah dan

Kades yang telah memberikan ijin, informasi dan bantuan untuk melakukan riset di wilayah masing-masing di Tangerang Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Luky, M. Arsyad A., A. Solihin, Dede I. H and Arif S, (2010). *Construction of Local Customary and Institutions on fisheries management systems in Indonesia*, (Konstruksi Pengetahuan Lokal dalam Pengelolaan Perikanan di Indonesia). IPB Press Bogor
- Allison. Edward H, Frank Ellis, (2001). *The livelihoods approach and management of small-scale fisheries*. Marine Policy
- Ardana, I Ketut. (2004). “Kesadaran Kolektif Lokal dan Identitas Nasional dalam Proses Globalisasi” dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra (eds). *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Bali: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press
- Chaniago, Andrinof A., (2012). *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. Jakarta: LP3ES
- Coulhoun, J.F. & Acocella, J.R. (1995). *Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan*. Alih Bahasa: Satmoko, R.S. Semarang: IKIP Semarang.
- Dahl, Robert A., (1982). *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control*, Yale University Press,
- Djamaluddin Ancok, *Hubungan Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Fakultas Psikologi, 03 Mei 2003, Yogyakarta

- Field, John. (2005). *Modal Sosial*. Medan: Penerbit Bina Media Perintis.
- Fouracre, P. (2001). *Transport and Sustainable Rural Livelihood*. Department of International Development. UK
- Gayatri, Irine Hiraswati (ed). (2008). *Runtuhnya Gampong Di Aceh, Studi Masyarakat Desa Yang Bergejolak*. Jakarta-Yogyakarta: LIPI dan Pustaka Pelajar.
- Hadi, Syamsul, dkk. (2006). *Disintegrasi Pasca Orde Baru, Negara, Konflik Lokal, Dan Dinamika Internasional*. Jakarta: CIREs FISIP UI dan Yayasan Obor Indonesia.
- Joanne P. M. Tangkudung, (2014). Proses Adaptasi Menurut Jenis Kelamin Dalam Menunjang Studi Mahasiswa FISIP Universitas Sam Ratulangi. *Journal "Acta Diurna" Volume III. No. 4*.
- Kartodirdjo, Sartono, (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Keesing, Roger M. , (1974). *Teori-Teori Tentang Budaya* (terjemahan) Amri Marzali: Theories of Cultures "Annual Review of Anthropology",
- Koentjaraningrat. (1987). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP), (2011) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
- Lawang, Robert, (2004). *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologi*, FISIP Press-Universitas Indonesia,
- Leksono, S. (2009). *Runtuhnya Modal Sosial, Pasar Tradisional: Perspektif Emic Kualitatif*. Malang: CV. Citra.
- Muhammad Arsyad Al Amin, (2015), *Strategi Adaptasi dan Inovasi Sosial Ekologi Untuk Keberlanjutan Pengelolaan Teluk Jakarta Dan Sekitarnya*, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan Institut Pertanian Bogor
- Ridho, Kholis, (2004), Persepsi Kesejahteraan Sosial Dan Keberagaman Muslim Perkotaan Hubungannya Dengan Perilaku Berzakat: Studi Filantropi Islam Pada Masyarakat Muslim Di Kec. Ciputat-Tangerang, *Thesis*, Departemen Sosiologi Paska Sarjana Universitas Indonesia
- Santoso, Slamet. Tanpa tahun. *Peran Modal Sosial terhadap Perkembangan Pedagang Kaki Lima di Ponorogo* (Role of Social Capital to Growth of Merchant Cloister in Ponorogo). (<http://ssantoso.umpo.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/Artikel-Peran-Modal-Sosial.pdf>, diakses tanggal 7 Mei 2013).
- Soerjono Soekanto, (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suharto, Edi., Tanpa tahun. *Modal Sosial dan Kebijakan Publik*. (http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/MODAL_SOSIAL_DAN_KEBIJAKAN_SOSIA.pdf, diakses tanggal 7 Mei 2013).
- Suparlan, Parsudi, (1979), 'Ethnic Groups of Indonesia', *The Indonesian Quarterly* vol. 7, no. 2, CSIS.
- Syadzily, Ace Hasan, (2014), Implementasi Kebijakan Pembentukan Daerah

Otonomi Baru Di Kota Tangerang Sleatan Banten, *Disertasi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung*

Ting-Toomey, Stella. (1999), *Communicating Across Culture*. New York: The Guilford Press.

Tumanggor, Rusmin, Kholis Ridho, Nurochim, (2012), *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana-Prenada

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Yustika, Ahmad Erani. (2008). *Ekonomi Kelembagaan (Definisi, Teori dan Strategi)*. Malang: Bayumedia Publishing.